



## **PRESIDENSI G20 INDONESIA: MEMBANGUN JEJAK DIPLOMASI EKONOMI YANG BERKESAN DI PANGGUNG INTERNASIONAL**

### **Indonesia's G20 Presidency: Building a Memorable Trace of Economic Diplomacy on the International Stage**

Silfia Anjani  
Program Studi Pendidikan Sejarah, Universitas Negeri Semarang  
silfiaanjani8@gmail.com

**ABSTRAK:** Penelitian ini dilatarbelakangi oleh peran penting G20 sebagai forum kerjasama ekonomi global, terutama setelah krisis yang terjadi pada tahun 1997-1998. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kontribusi Indonesia dalam G20 serta dampaknya terhadap diplomasi ekonomi di tingkat internasional. Rumusan masalah yang diangkat mencakup bagaimana Indonesia dapat memperbaiki citranya dan menunjukkan kepemimpinan yang efektif dalam forum tersebut. Melalui pendekatan historis yang mencakup pemilihan topik, heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi, penulis menganalisis langkah-langkah yang diambil oleh Indonesia untuk memperbaiki citranya dan menunjukkan kepemimpinan dalam pelaksanaan G20. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa Indonesia secara aktif terlibat dalam upaya pemulihan ekonomi global dan berkomitmen untuk mendukung kerjasama internasional yang berkelanjutan. Simpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa partisipasi Indonesia dalam G20 tidak hanya memperkuat posisinya di panggung internasional, tetapi juga membuka peluang untuk kolaborasi yang lebih luas. Saran yang diberikan adalah agar Indonesia terus meningkatkan diplomasi dan kerjasama internasional guna menghadapi tantangan global yang semakin kompleks.

**Kata kunci:** *Presidensi G20, Diplomasi Ekonomi, Pandemi, Ekonomi Global*

**ABSTRACT:** *This research is motivated by the important role of the G20 as a forum for global economic cooperation, especially after the crisis that occurred in 1997-1998. The main objective of this research is to analyze Indonesia's contribution to the G20 and its impact on economic diplomacy at the international level. The problem formulation raised includes how Indonesia can improve its image and demonstrate effective leadership in the forum. Through a historical approach that includes topic selection, heuristics, verification, interpretation, and historiography, the author analyzes the steps taken by Indonesia to improve its image and show leadership in the implementation of the G20. The results of the discussion show that Indonesia is actively involved in global economic recovery efforts and is committed to supporting sustainable international cooperation. The conclusions of this research confirm that Indonesia's participation in the G20 not only strengthens its position on the international stage, but also opens up opportunities for wider collaboration. The advice given is for Indonesia to continue to improve diplomacy and international cooperation to face increasingly complex global challenges.*

**Keywords:** *G20 Presidency, Economic Diplomacy, Pandemic, Global Economy*

## PENDAHULUAN

Hubungan Internasional merupakan suatu dinamika yang melibatkan hubungan antar negara secara global. Andre (1999) dalam Subagyo (2016) menyatakan bahwa hubungan internasional bertujuan untuk mencegah peperangan dan menciptakan kedamaian untuk menghilangkan prasangka negatif dan mencegah terulangnya Perang Dunia I. Artinya perang dapat dicegah dengan menciptakan perdamaian melalui kerjasama, komunikasi dan sinergi secara konstruktif.

Meletusnya Perang Dunia II pada 1930-an tidak lain disebabkan karena persaingan kekuatan besar seperti Amerika Serikat, Uni Soviet, Jerman, dan Jepang menciptakan ketegangan yang meningkat seiring dengan berkembangnya ambisi ekspansionis dan konflik kepentingan. Perang Dunia II menjadi titik balik penting dalam evolusi dinamika global. Konflik ini mencerminkan kegagalan diplomasi dalam mencegah eskalasi konflik, serta kurangnya mekanisme efektif untuk menyelesaikan perselisihan antarnegara.

Perang ini telah mengubah tatanan politik dan ekonomi internasional, setelah berakhirnya Perang Dunia II muncul dua kekuatan besar di dunia yaitu Blok Timur dan Blok Barat yang terus bersaing menyebabkan perang dingin. Perang dingin yang terjadi nyatanya membawa dampak yang besar terhadap negara-negara lain di dunia. Dengan ini, mulai muncul kesadaran mengenai kelangsungan hidup suatu negara yang tidak dapat dilakukan secara mandiri tanpa melakukan kerja sama dengan negara lain (Abdurachman & Prakoso, 2017). Setelah perang berakhir, muncul upaya besar untuk membangun kembali sistem internasional yang lebih stabil, adil, dan damai dengan

pembentukan organisasi internasional seperti PBB dan IMF yang bertujuan untuk mengelola hubungan kerjasama internasional. Hubungan internasional merupakan suatu kebutuhan bagi negara untuk mencapai tujuan dan kepentingan nasionalnya dalam membangun kerja sama dengan negara lain.

Membina hubungan internasional dilakukan melalui diplomasi yang dilakukan oleh sebuah negara untuk memelihara kesepahaman dan relasinya dengan negara lain (Syauqi, 2023). Sejak masa kemerdekaan Indonesia telah mempromosikan dirinya ke kancah dunia internasional untuk membangun jejak diplomasinya. Sejarah mencatat bahwa Indonesia telah menjalankan beragam kerja sama dengan negara lain di berbagai tingkatan seperti kerja sama bilateral yang telah terbentuk dengan beberapa negara lain. Pada tingkatan regional, Indonesia memiliki peran dalam memelopori pembentukan kerja sama regional seperti ASEAN dan APEC. Indonesia juga membangun kerja sama multilateral dengan menjadi anggota dalam organisasi WTO dan IMF. Indonesia juga tergabung dalam forum perekonomian global G20 (*Group of twenty*) (Isabela dan Nailufar, 2022).

G20 (*Group of twenty*) yang merupakan sebuah forum tingkat tinggi yang bertujuan sebagai wadah untuk melakukan kerja sama di bidang ekonomi dan keuangan negara-negara anggota. Pembentukan G20 merupakan forum internasional yang dibentuk pada tahun 1999 sebagai respon akibat krisis keuangan pada tahun 1997-1998 yang melanda dunia. Beranggotakan 19 negara dan Uni Eropa G20 menjadi forum bagi negara anggota dengan dua jalur pembahasan yaitu *finance track* dan juga *sherpa track* (G20pedia, 2022).



Pandemi Covid-19 yang melanda dunia mengharuskan negara untuk memfokuskan pada penanganan virus ini sehingga menyebabkan beberapa kegiatan diplomasi terhenti. Perekonomian global sangat terdampak karena perjalanan antar negara dibatasi akibat dari penyebaran virus ini. Termasuk Indonesia yang turut serta terdampak terutama pada sektor perekonomian yang menyebabkan rusaknya citra Indonesia akibat dari berbagai isu lambatnya penanganan pandemi Covid-19 oleh pemerintah yang diiringi dengan menurunnya kekuatan diplomasi Indonesia (Syauqi, 2023). Oleh karena itu, pelaksanaan G20 di Indonesia yang dimulai pada Desember tahun 2021 hingga akhir tahun 2022 merupakan kesempatan bagi Indonesia untuk memperbaiki citranya dan menunjukkan kepemimpinan dalam pelaksanaan G20. Indonesia juga dapat menunjukkan diplomasinya untuk mengatasi dampak ekonomi dari pandemi dan menunjukkan kesiapan serta komitmen dalam mendukung upaya global untuk pemulihan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

## **METODA**

Penyusunan artikel ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan historis yang terdiri dari tahap pemilihan topik, heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi (Kuntowijoyo, 2013). Pada tahap awal, dilakukan pemilihan topik permasalahan yang akan dibahas oleh penulis. Heuristik merupakan tahapan untuk mencari sumber dan informasi baik melalui buku maupun artikel jurnal yang relevan dengan topik pembahasan. Verifikasi atau kritik sumber merupakan tahapan untuk mengetahui validitas data atau informasi yang ditemukan mencakup keakuratan dan kesesuaian dengan topik

pembahasan. Interpretasi merupakan proses analisis dan penafsiran hasil pengumpulan data atau informasi yang telah dilakukan. Pada tahapan terakhir yaitu historiografi yang merupakan penyusunan hasil penelitian dalam bentuk tulisan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Sejarah Pembentukan dan Perkembangan G20**

Pada tahun 1990-an terjadi beberapa krisis ekonomi yang menandakan perlunya pendekatan baru dalam menghadapi tantangan dunia yang semakin terhubung secara global. Krisis ekonomi pada tahun 1994 di Mexico ditandai dengan penurunan nilai mata uang dan berdampak pada negara di Kawasan Amerika Selatan. Tahun 1997 terjadi krisis moneter yang melanda negara di Kawasan Asia termasuk Indonesia, Thailand dan Korea Selatan serta menjadi wabah yang menyebar di berbagai negara walaupun dengan tingkatan level yang berbeda-beda hingga menyentuh Rusia dan Amerika pada tahun 1998 (Putri, 2023). Beberapa strategi dan pendekatan telah dilakukan oleh beberapa negara seperti Cina dan India dalam merespons krisis ini. Akan tetapi setiap strategi dan pendekatan yang diambil berpotensi mengakibatkan semakin meningkatnya pengangguran dan penurunan daya beli masyarakat yang akan berdampak pada transaksi perdagangan global (Timur & Sundari, 2023). Terjadinya krisis moneter pada tahun 1997 hingga 1999 menimbulkan sebuah gerakan untuk membentuk forum kerja sama multilateral G20 yang diinisiasi oleh G7 (*Group of Seven*) (Darwis & Renyoet, 2022).

G7 beranggotakan Amerika Serikat, Inggris, Jepang, Kanada, Perancis, Italia,



dan Jerman yang bertujuan untuk mempromosikan kerja sama terkait dengan isu perekonomian yang ada dan menjadi harapan baru dalam menyelesaikan permasalahan ini. Kemudian muncul kesadaran atas dimensi global bahwa untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi tidak akan berhasil apabila hanya dilakukan oleh mereka. Kesadaran ini memunculkan peranan negara-negara dari berbagai benua untuk ikut serta mendiskusikan dan mencari penyelesaian dari krisis moneter ini. Dengan ini, maka G7 berubah menjadi G20 dengan anggotanya terdiri dari 19 negara dan satu organisasi regional (Uni Eropa) (Syauqi, 2023). Anggota G20 diantaranya Amerika Serikat, Arab Saudi, Afrika Selatan, Argentina, Australia, Brazil, India, Indonesia, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Korea Selatan, Meksiko, Prancis, Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Rusia, Turki, dan Uni Eropa. Mulai tahun 1999 G20 menjadi forum utama untuk membahas mengenai isu-isu perekonomian global dalam rangka pemulihan dari krisis moneter yang terjadi.

G20 mencerminkan mekanisme pemerintahan global (*global governance*) dalam bentuk forum yang fokus pada kegiatan kerja sama internasional dengan berlangsungnya diskusi dan pertukaran ide-ide lintas negara oleh pengambil keputusan dan pemangku kepentingan terkait dengan permasalahan yang dihadapi (Pal, 2012; Sudjatmiko dkk, 2022). Sebagai forum internasional G20 tidak memiliki sekretariat permanen sehingga koordinasi diatur melalui sistem Troika, dimana kepemimpinan terdiri dari tiga negara yaitu negara yang menjadi presidensi pada tahun sebelumnya, tahun ini, dan tahun yang akan datang (Press UGM, 2023). Setiap anggota forum memiliki kesempatan untuk menjadi tuan rumah dan pemimpin pelaksanaan pertemuan G20.

Dialog G-20 yang reguler diselenggarakan pada bulan Desember 1999 dan terus dilembagakan setiap tahunnya hingga saat ini. G-20 disebut oleh para perintisnya sebagai terobosan baru "*to make a smaller world governable and fairer*". G-20 dapat didefinisikan sebagai sebuah komite baru untuk mengelola isu-isu ekonomi global. Krisis ekonomi Amerika Serikat pada tahun 2007 semakin menegaskan pentingnya G-20. Sejak pendiriannya G20 merupakan forum pertemuan yang dihadiri oleh Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral namun mulai tahun 2008 forum ini juga menghadirkan Kepala Negara dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT). Para pendukung formalisasi G-20 menganggap perlu meningkatkan dialog G-20 dari tingkat kementerian ke tingkat Konferensi Tingkat Tinggi. Hanya pemimpin politik yang memiliki kemampuan untuk membuat keputusan strategis meskipun tidak mengikat secara hukum memiliki dampak penting pada pemenuhan komitmen politik yang lebih kuat. Dengan demikian, kesepakatan yang dicapai dalam forum *intergovernmental* di tingkat tertinggi akan mengarah pada penyesuaian kebijakan di masing-masing negara, termasuk keputusan yang bersifat teknis. Transformasi G-20 menjadi forum yang dipimpin oleh para pemimpin tingkat tertinggi akan memastikan bahwa keputusan yang dihasilkan dalam forum tersebut dapat diimplementasikan dengan efektif.

Seiring dengan berjalannya waktu forum G20 juga mengarahkan perhatiannya pada upaya untuk mencapai stabilitas keuangan global dan secara bertahap bertransformasi menjadi forum yang juga membahas mengenai isu-isu global diluar keuangan. Dalam G20 dibahas dua jalur utama pembahasan yaitu *Finance track* dan juga *Sherpa track* (G20,



2022). *Finance Track* merupakan jalur pembahasan yang memfokuskan pada bidang keuangan seperti kebijakan moneter, fiskal, riil, investasi regulasi keuangan, inklusi keuangan dan perpajakan internasional. Sedangkan *Sherpa track* merupakan jalur pembahasan mengenai bidang-bidang diluar isu keuangan seperti ekonomi digital, lapangan pekerjaan, pendidikan, pertanian, budaya, kesehatan perdagangan, investasi, pemberdayaan perempuan, energi berkelanjutan, urusan luar negeri, anti korupsi.

Secara kolektif, keanggotaan G20 mewakili kurang lebih 80% perekonomian global, 75% perdagangan internasional dan 60% populasi dunia (G20, 2022). G20 memiliki peranan sentral dalam mengatur stabilitas perekonomian dan mencegah terjadinya krisis keuangan global, walaupun pada hakikatnya hasil pertemuan G20 tidak bersifat mengikat akan tetapi dapat menjadi acuan dan dasar dalam pembuatan kebijakan nasional suatu negara (Sudjatmiko, dkk, 2022). Hasil dari Kelompok Riset G20 *University of Toronto* menyebutkan telah dilakukan sebanyak 23 isu yang dibahas, 194 komitmen, dengan rata-rata 71% tingkat kepatuhan terhitung sejak pertama kali diadakan tahun 1999 hingga tahun 2020 (Astuti, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa G20 memegang peranan penting dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui kebijakan, hukum, dan peraturan yang dihasilkannya.

### **Indonesia dalam Presidensi G20**

Indonesia telah menjadi anggota dari forum G20 sejak awal pembentukannya pada tahun 1999. Keanggotaan Indonesia dalam G20 ini sekaligus merepresentasikan dirinya sebagai perwakilan negara berkembang di Kawasan Asia Tenggara guna menghadapi berbagai isu perekonomian global. Dengan

ini Indonesia bertujuan untuk menciptakan suatu kesepakatan yang lebih merata dan saling menguntungkan serta memperkuat diplomasi ekonomi tanpa mengabaikan pentingnya solidaritas antar negara berkembang (Astuti & Fathun, 2020). Masuknya Indonesia sebagai salah satu negara berkembang dalam forum G20 tidak terlepas dari beberapa faktor seperti peran Indonesia dalam pembentukan ASEAN sebagai wadah untuk menangani berbagai permasalahan perekonomian di tingkat regional. Pengalaman Indonesia sebagai negara yang pernah mengalami krisis moneter tahun 1998 yang cukup mengerikan sebelumnya dan telah berhasil mengatasinya menunjukkan bahwa Indonesia memiliki peranan penting dan terlibat secara aktif dalam perekonomian global (Timur & Sundari, 2023).

Bergabungnya Indonesia dalam forum G20 ini menjadi sarana Indonesia untuk mencapai berbagai kepentingan nasionalnya termasuk memahami peran dan tanggungjawabnya sebagai wakil dari negara berkembang lainnya. Sebagai negara berkembang Indonesia dinilai memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup penting bagi negaranya dan negara berkembang lainnya. Memiliki jumlah penduduk terbesar ketiga di dunia setelah China dan Amerika Serikat yang mana mayoritas penduduknya adalah seorang muslim memungkinkan Indonesia untuk menjembatani perbedaan diantara peradaban dunia saat ini. Besarnya jumlah penduduk Indonesia memiliki potensi untuk menjadi pusat pembelian global, melalui pertumbuhan perekonomian yang stabil maka akan memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi di lain negara hingga pada tingkat Asia maupun dunia (Timur & Sundari, 2023).

Meledaknya pandemi virus Covid-19 pada awal tahun 2020 memberikan dampak yang begitu besar terhadap

pertumbuhan perekonomian global yang cenderung menurun. Pada pertemuan G20 tahun 2020 telah dibahas berbagai langkah-langkah untuk menanggulangi pandemi ini secara berkelanjutan termasuk langkah-langkah fiskal dan moneter dalam rangka mitigasi risiko ekonomi global (Astuti, 2020). Para anggota G20 terus melakukan pertemuan dan pembahasan kaitannya dengan upaya percepatan pemulihan ekonomi global.

Indonesia ditunjuk sebagai presidensi G20 dalam pertemuan Riyadh Summit tahun 2020 dan diserahkan secara resmi pada akhir pelaksanaan Presidensi G20 di Roma tanggal 30-31 Oktober 2021 (Sudjatmiko, dkk, 2022). Pada dasarnya, sebagai bentuk komitmen para negara anggota G20 maka akan terjadi pemberian mandat kepada penyelenggara presidensi yang baru sehingga akan terjadi keberlanjutan dalam pembahasan agendanya (Astuti, 2020). Mengacu pada sistem Troika maka ketiga negara yaitu Italia sebagai penyelenggara presidensi sebelumnya, Indonesia sebagai penyelenggara saat ini, dan India sebagai presidensi selanjutnya saling berkolaborasi untuk kesuksesan dan kelancaran penyelenggaraan presidensi G20 tahun 2022 di Indonesia. Berlangsung sejak 1 Desember 2021 hingga 30 November 2022, Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggara Presidensi G20 dengan mengusung tema “*Recover Together, Recover Stronger*” atau “Pulih Bersama dan Kuat Bersama”. Tema ini merupakan upaya besar Indonesia untuk pulih dari dampak ketidakstabilan ekonomi yang dipicu oleh pandemi global sejak tahun 2019 (G20, 2022). Presidensi G20 tahun 2022 di Indonesia setidaknya membahas mengenai tiga hal utama yaitu penanganan kesehatan yang inklusif, transformasi digital, dan transisi energi berkelanjutan.

Berlangsung selama satu tahun, Presidensi G20 di Indonesia direncanakan akan menyelenggarakan pertemuan tingkat *engagement group* sebanyak 90 kali, pertemuan tingkat *working group* sebanyak 56 kali, pertemuan tingkat *Sherpa/deputi* sebanyak 17 kali, pertemuan tingkat Menteri dan Gubernur Bank Sentral sebanyak 20 kali, serta pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) yang dihadiri oleh kepala negara (Renyonet & Darwis, 2022). Hal ini merupakan kesempatan bagi Indonesia sebagai negara berkembang dalam menunjukkan kemampuannya untuk ikut serta menjadi bagian dari pertumbuhan perekonomian global. Dikarenakan berdasarkan rekam jejak perekonomian Indonesia yang kondisinya cenderung stabil termasuk pada saat pandemi Covid-19 melanda, mengingat banyak negara lain yang mengalami penurunan tingkat perekonomiannya (Timur & Sundari, 2023). Prestasi demikian dapat dimanfaatkan Indonesia dalam menyelenggarakan presidensi G20 untuk menunjukkan kredibilitas dan akuntabilitasnya dalam tingkat internasional dan dapat memberikan kesan baik di mata dunia. Melalui presidensi G20 Indonesia akan bertemu dengan negara-negara lain yang memiliki kekuatan ekonomi yang lebih besar dengan dominasinya di pasar internasional. Dengan ini maka Indonesia memiliki peran strategis dalam menetapkan target dan kebijakan sesuai dengan kondisi ekonomi saat ini dalam forum internasional terutama kaitannya dengan dampak akibat pandemi Covid-19.

Berdasarkan data dalam agenda pelaksanaan presidensi G20 di Indonesia menunjukkan bahwa dari tiga agenda prioritas yang dibahas seperti Ketahanan Sistem Kesehatan Global memiliki skor tertinggi sebesar 69,41 %, dilanjutkan agenda Pendanaan Transisi Energi



sebesar 30%, serta Konektivitas dan Pemulihan Pasca pandemi sebesar 9,29% (Ramadhanto, dkk, 2022). Berdasarkan data skor ini artinya hal ini merupakan bentuk kesadaran bersama bahwa isu kesehatan global juga merupakan masalah yang dihadapi bersama. Indonesia berkomitmen dalam mendorong negara lain sebagai langkah optimis untuk segera pulih dari pandemi Covid-19 dan menjadi lebih siap dalam menghadapi ancaman di masa yang akan datang. Indonesia menegaskan kebutuhan akan pembentukan dana kesehatan global (*global health fund*) secara merata di seluruh dunia yang merupakan bagian penting dalam manajemen kesehatan global. Tercatat dana sebanyak 23,4 triliun telah terkumpul yang diperuntukkan untuk mengantisipasi pandemi di masa yang akan datang (*Pandemic Fund*) dan merupakan salah satu hasil dari presidensi G20 yang disampaikan langsung oleh Presiden Indonesia. Selain itu terkumpul juga dana *Resilience and Sustainability Trust* (RST) dari IMF sebesar 81,6 miliar yang diperuntukkan untuk memberikan bantuan kepada negara-negara yang sedang menghadapi krisis. Melalui presidensi G20 tahun 2022 juga terjadi penyalarsan pendistribusian vaksin secara merata ke negara-negara dengan pendapatan rendah. Hal ini dikarenakan berdasarkan laporan dari UNICEF menyebutkan bahwa negara anggota G20 mendapatkan vaksin setidaknya 15 kali lebih besar dibandingkan dengan negara-negara berpenghasilan rendah di dunia sehingga melalui presidensi G20 ini tercipta suatu keselarasan dan keadilan bagi setiap negara di berbagai belahan dunia (Timur & Sundari, 2022).

Transisi energi merupakan prioritas kedua dalam agenda presidensi G20 tahun 2022 di Indonesia. Indonesia mengakui urgensi mencapai kesepakatan global

dalam mempercepat transisi energi dengan menegaskan terkait prinsip keadilan dalam G20 melalui tiga bahasan utama yaitu peningkatan akses energi bagi negara-negara selatan, meningkatkan kemampuan teknologi bersih, serta menguatkan pembiayaan untuk transisi energi (Hassan, dkk, 2022). Hal ini dengan mempertimbangkan ketimpangan yang terjadi antara negara maju dengan negara berkembang. Di tengah pembahasan agenda transisi energi dalam pelaksanaan presidensi G20 ini Indonesia dapat mengambil peran untuk mendorong dan memimpin terwujudnya transisi energi yang berkeadilan.

Selanjutnya, berkaitan dengan agenda prioritas ketiga dalam pelaksanaan presidensi G20 Indonesia adalah proses pemulihan ekonomi pasca pandemi melalui transformasi digital dan ekonomi. Hal ini merupakan keberlanjutan dari pembahasan pada presidensi sebelumnya dalam kelompok kerja (*working group*) untuk mengkaji pemanfaatan teknologi digital dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan (Timur & Sundari, 2023).

Pelaksanaan presidensi G20 yang diadakan setiap tahun ini menghasilkan deklarasi dari para pemimpin negara anggota yang berisikan beberapa poin-poin penting termasuk dokumen-dokumen penting serta kesepakatan di tingkat kementerian. Ketiga agenda prioritas ini merupakan pembahasan yang telah disepakati oleh negara-negara anggota dengan memposisikan G20 sebagai pusat dalam tatanan perekonomian global mencapai 70 %. Karena itu, G20 hadir sebagai penghubung antara berbagai peradaban di belahan dunia termasuk negara barat dan negara muslim serta negara di kawasan Asia untuk saling bekerja sama utamanya dalam hal ekonomi global. G20 memberikan peran penting



bagi Indonesia dalam mengembangkan kemampuan diplomasi ekonominya akibat keterpurukan bidang ekonomi yang melanda dunia pasca pandemi serta membangun citra yang baik sebagai negara yang mempromosikan kesatuan dan mampu menarik minat investor asing untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia (Syauqi, 2023). Kesempatan ini menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk menunjukkan peran pentingnya dalam panggung internasional dan menjadikan motivasi untuk ikut serta secara aktif dalam forum internasional.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

Terjadinya krisis moneter pada tahun 1997 hingga 1999 menimbulkan sebuah gerakan untuk membentuk forum kerja sama multilateral G20 yang terdiri dari 19 negara dan satu organisasi regional (Uni Eropa). Anggota G20 diantaranya Amerika Serikat, Arab Saudi, Afrika Selatan, Argentina, Australia, Brazil, India, Indonesia, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Korea Selatan, Meksiko, Prancis, Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Rusia, Turki, dan Uni Eropa. G20 merupakan forum internasional sebagai wadah untuk melakukan pembahasan untuk mengatasi permasalahan perekonomian global.

Berdasarkan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Indonesia memiliki peran yang signifikan dalam forum G20, terutama dalam upaya memperbaiki citranya dan menunjukkan kepemimpinan di tingkat internasional. Melalui partisipasinya, Indonesia tidak hanya berkontribusi dalam pemulihan ekonomi global pasca krisis, tetapi juga memperkuat posisinya sebagai negara berkembang yang aktif dalam diplomasi ekonomi. Dengan demikian, Indonesia mampu memanfaatkan G20 sebagai platform untuk mencapai kepentingan nasional dan

berkolaborasi dengan negara lain dalam menghadapi tantangan global.

Sebagai langkah ke depan, disarankan agar Indonesia terus meningkatkan strategi diplomasi dan kerjasama internasionalnya, terutama dalam konteks G20. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat jaringan kerjasama dengan negara anggota lainnya, serta aktif berpartisipasi dalam inisiatif yang mendukung pemulihan ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu, Indonesia perlu memanfaatkan forum G20 untuk mengadvokasi kepentingan negara berkembang dan berkontribusi dalam menciptakan solusi yang inklusif terhadap isu-isu global.

## **PUSTAKA ACUAN**

- Astuti, W. R. D., & Fathun, L. M. (2020). Diplomasi Ekonomi Indonesia di dalam Rezim Ekonomi G20 pada Masa Pemerintahan Joko Widodo. *Intermestic: Journal of International Studies*, 5(1), 47-68.
- Astuti, W. R. D. (2020). Kerja Sama G20 dalam Pemulihan Ekonomi Global dari COVID-19. *Andalas Journal of International Studies (AJIS)*, 9(2), 131-148.
- Cakrayudha Ramadhanto, Tatok Djoko Sudiarto, B. K. P. (2022). ANALISIS KONTEN AGENDA PRIORITAS INDONESIA PADA PRESIDENSI G20.7(12).
- Darwis, DD, & Renyoet, CC (2022, Desember). PENINGKATAN PENGETAHUAN REMAJA DI LINGKUNGAN SMA NEGERI 4 KOTA JAYAPURA TENTANG PRESIDENSI G20 INDONESIA TAHUN 2022. Dalam *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat* (Vol. 3, pp. SNPPM2022SH-12).
- g20.org. 2022. "G20 Pedia Indonesia 2022." <https://research.ui.ac.id/rese>



- arc  
h/wpcontent/uploads/2022/02/G20  
pedia.pdf.
- Press, U. G. M. (2023). *G20 di tengah perubahan besar: momentum kepemimpinan global Indonesia?* UGM PRESS.
- PUTRI, R. S. P. (2023). STRATEGI KEBERHASILAN PRESIDENSI INDONESIA DALAM PELAKSANAAN KTT G20 TAHUN 2022 DI TENGAH KONFLIK RUSIA-UKRAINA.
- Solechah, W. M., & Sugito, S. (2023). Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan sebagai Kepentingan Nasional Indonesia dalam Presidensi G-20. *Dialektika : Jurnal Ekonomi Dan Ilmu Sosial*, 8(1), 12–23.  
<https://doi.org/10.36636/dialektika.v8i1.1487>.
- Sudjatmiko, T., Yayusman, M. S., Budianto, F., & Syafarani, T. R. (2022). PERAN INDONESIA SEBAGAI KEKUATAN MENENGAH DALAM G20 DI TENGAH DISRUPSI GEOPOLITIK KONFLIK RUSIA-UKRAINA. *Jurnal Penelitian Politik*, 19(2), 93-110.
- Subagyo, A. (2016). Studi Hubungan Internasional di Indonesia. *Dinamika Global: Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, 1(02), 2-23.
- Suherman, R. A., & Asy'ari, M. (2023). Kerja Sama Multilateral G20 dalam Mendukung Pemulihan Negara-Negara terhadap Pandemi COVID-19. *JILS (Journal of International and Local Studies)*, 7(1), 16-27.
- Syauqi, S. L. (2023). *Strategi Diplomasi Publik Indonesia dalam Presidensi Indonesia Pada KTT G20 Tahun 2021-2022* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Timur, L. M., & Sundari, R. (2023). Strategi Diplomasi Indonesia dalam Presidensi G-20 di Bali. *Journal of Diplomacy and International Studies*, 6(01), 65-85.